



RENCANA KERJA 2022 PERUBAHAN

PEMERINTAH KOTA BONTANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan bahan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang.

Tulisan sederhana ini berisi rancangan perubahan Renja BKPSDM Tahun 2022. Adanya kebutuhan yang dinamis sehingga perlu diakomodir pada rancangan Renja perubahan 2022. Perubahan tersebut meliputi perubahan target sub kegiatan serta pagu anggaran masing-masing sub kegiatan.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk kesempurnaannya, saran, pendapat dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan. Besar harapan kami semoga informasi singkat pada tulisan ini dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya.

Bontang, 2 Agustus 2022
KEPALA,


Drs. SUDI PRIVANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197412251993031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud Perubahan Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022.....	2
1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BONTANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022.....	4
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang	13
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA BKPSDM TAHUN 2022....	15
3.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2022	15
BAB IV PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD PERUBAHAN LATAR BELAKANG

Berlakunya Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah membawa konsekuensi bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD. Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan tugas dan fungsi serta mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sementara itu sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki dokumen Renja, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun 2022. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) BKPSDM Kota Bontang tahun 2022 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BKPSDM Kota Bontang tahun 2022 yang telah ditetapkan pada Prioritas Pembangunan Daerah dan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, dimana dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022, telah terjadi perubahan kebutuhan yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap Renja Tahun 2022. Beberapa faktor, baik eksternal maupun internal, menyebabkan terjadinya perubahan tersebut.

Adapun faktor internal yang mendorong perlunya dilakukan perubahan terhadap Renja Tahun 2022 terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan yang menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan yang meliputi perubahan kebutuhan, perubahan target sub kegiatan, dan pagu anggaran.

I.2 TUJUAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Bontang.
2. Menjadi dasar penyesuaian nama kegiatan, perubahan indikator kinerja, perubahan target, dan perubahan pagu anggaran.

I.3 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 mencakup adanya perubahan target dan indikator serta pagu anggaran pada beberapa sub kegiatan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BONTANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BONTANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

Dalam Renja Tahun 2022, BKPSDM Kota Bontang merencanakan 3 program yang terdiri dari 13 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan rencana anggaran sebesar Rp 16.700.000.000,00. Namun, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKPSDM Kota Bontang TA 2022, alokasi anggaran BKPSDM sebesar Rp 15.745.997.485,00. Terdapat selisih sebesar Rp 954.002.515,00 antara anggaran dalam Renja dengan anggaran di DPA 2022 karena menyesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah dan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, penyesuaian nama sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020, sehingga anggaran belanja langsung terdiri dari 3 program, 13 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada BKPSDM Kota Bontang sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2021 dapat disampaikan sebagai berikut:

TABEL 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM s.d. TW II TAHUN 2021

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13=6+12		14=13/5x100%		15	16				
1. Meningkatnya kinerja tugas dan fungsi perangkat daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Indeks Kepuasan Masyarakat perangkat daerah	100%	11,668,291,331	100%	10,610,006,984	100%	9,181,905,985	0%	1,781,776,162	0%	2,842,655,380	0%	-	0%	-	0%	4,624,431,542	100%	15,234,438,526	100.00	#DIV/0!	Sekretariat		
	1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan laporan			0	-	1 Dokumen	11,000,000	0		0		-	0	-	0	-	0		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
	1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen renstra perangkat daerah			0	-	1 Dokumen	11,000,000	0		0		-	0	-	0	-	0		-	#DIV/0!	#DIV/0!			
	1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	49 Orang	9,277,625,312	46 Orang	7,270,350,224	46 Orang	7,328,419,386	43 Orang	1,627,463,462	46 Orang	2,002,544,194	0	-	0	-	46 Orang	3,630,007,656	92 Orang	10,900,357,880	187.76	117.49			
	1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	49 Orang	9,277,625,312	46 Orang	7,270,350,224	46 Orang	8,672,622,065	43 Orang	1,627,463,462	46 Orang	2,002,544,194	0	-	0	-	89 Orang	3,630,007,656	135 Orang	10,900,357,880	275.51	117.49			
	1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	56 Orang	266,000,000	53 Orang	674,624,641	53 Orang	460,242,500	0		50 Orang	369,946,500	0	-	0	-	50 Orang	369,946,500	103 Orang	1,044,571,141	183.93	392.70			
	1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya		- Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya - Jumlah Pakaian Olah Raga	56 Stel	56,000,000	300 Stel	506,329,600	65 Stel	99,190,000	0		49 Stel	73,426,500	0	-	0	-	49 Stel	73,426,500	349 Stel	579,756,100	716.07	1035.28			
	1.3.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah kursus singkat/pelatihan/sosi alisasi/bimtek yang diikuti sesuai tupoksi	20 Kali	60,000,000	8 Kali	23,100,000	72 Kali	324,000,000	0		50 Kali	296,520,000	0	-	0	-	50 Kali	296,520,000	58 Kali	319,620,000	290.00	532.70			
	1.3.3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pelaksanaan kegiatan	1 Kali	150,000,000	1 Kali	145,195,041	1 Kali	37,052,500	0		0	-	0	-	0	-	0		1 Kali	145,195,041	100.00	96.80			
	1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum	4 Layanan	804,176,000	4 Layanan	1,009,123,067	4 Layanan	602,127,415	3 Layanan	71,386,839	4 Layanan	145,181,937	0	-	0	-	4 Layanan	216,568,776	8 Layanan	1,225,691,843	200.00	152.42			
	1.4.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibutuhkan	18 Jenis	150,000,000	8 Jenis	302,222,990	6 Jenis	74,089,302	0		3 Jenis	-	0	-	0	-	3 Jenis	-	11 Jenis	302,222,990	61.11	201.48			

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6+12	14=13/5x100%	15	16											
		1.4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah kotak nasi	1350 Kotak		2019 Kotak		0		0		-	0		0		0		0		2019 Kotak		149,56		2021	
			- Jumlah kotak snack	2300 Kotak		3021 Kotak		0		0		-	0		0		0		0		3021 Kotak		131,35			
			- Jumlah porsi makan minum tamu	110 Porsi		92 Porsi		0		0		-	0		0		0		0		92 Porsi		83,64			
			- Jumlah jenis bahan logistik kantor yang dibutuhkan	5 Jenis	150,000,000	5 Jenis	187,181,110	5 Jenis	33,428,804	1 Jenis	1,298,000	5 Jenis	-	0	-	0	-	5 Jenis	1,298,000	10 Jenis	188,479,110	200,000	125,65			
		1.4.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan & penggandaan yang dibutuhkan	10 Jenis	180,000,000	10 Jenis	210,563,578	5 Jenis	140,470,809	2 Jenis	12,100,000	4 Jenis	44,004,314	0	-	0	-	5 Jenis	56,104,314	15 Jenis	266,667,892	150,000	148,15			
		1.4.4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	90 Kali		324,176,000	110 OH	309,155,389	67 OH	354,138,500	20 OH	57,988,839	38 OH	101,177,623	0	-	0	-	58 OH	159,166,462	168 OH	468,321,851	186,67	144,47		
			- Jumlah kotak nasi					575 Kotak		570 Kotak		-	150 Kotak	-	0	-	0	-	720		720 Kotak					
			- Jumlah kotak snack					1565 Kotak		175 Kotak		-	184 Kotak	-	0	-	0	-	359		359 Kotak					
			- Jumlah porsi makan minum tamu					1061 Porsi		0		-	0	-	0	-	0	-	0		0 Porsi					
		1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	4 Jenis	390,000,000	10 Jenis	642,033,900	7 Jenis	198,963,696	0		-	1 Jenis	149,184,000	0	-	0	-	1 Jenis	149,184,000	11 Jenis	791,217,900	275,00	202,88		
		1.5.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	3 Jenis	70,000,000	9 Jenis	605,040,900	6 Jenis	197,842,498	0		-	1 Jenis	149,184,000	0	-	0	-	1 Jenis	149,184,000	10 Jenis	754,224,900	333,33	1077,46		
		1.5.2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 Jenis	50,000,000	1 Jenis	2,393,000	1 Jenis	1,121,198	0		-	0		-	0	-	0		1 Jenis	2,393,000	100,00	4.79			
		1.5.3. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau roda 2	1 unit kendaraan roda empat; 8 unit kendaraan roda dua	270,000,000	1 unit kendaraan roda dua	34,600,000	0		-	0		-	0	-	0	-	0		1 unit kendaraan roda dua	34,600,000	11.11	12.81			
		1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	332,434,288	3 Jenis	394,755,788	3 Jenis	265,885,088	3 Jenis	57,601,761	3 Jenis	80,215,555	0	-	0	-	3 Jenis	137,817,316	6 Jenis	532,573,104	200,00	160,20			
		1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah materai yang tersedia	600 Lembar		600 Lembar		600 Lembar		130 Lembar		201 Lembar		2,128,075	0	-	0	-	331 Lembar		931 Lembar		155,17		192,45	
			- Jumlah surat yang dikirim	70 Surat		8,250,000	12,399,100	429 Surat		1,350,000		5 Surat		0	-	0	-	7 Surat		3,478,075		15,877,175				
		1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan layanan komunikasi kantor	12 Bulan	108,000,000	12 Bulan	108,000,000	12 Bulan	72,500,000	3 Bulan	17,090,313	3 Bulan	13,320,000	0	-	0	-	6 Bulan	30,410,313	18 Bulan	138,410,313	150,00	128,16			
		1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak Daerah	7 Orang	216,184,288	7 Orang	274,356,688	6 Orang	185,135,088	6 Orang	39,161,448	6 Orang	64,767,480	0	-	0	-	12 Orang	103,928,928	19 Orang	378,285,616	271,43	174,98			

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11	14=13/5x100%	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
1.		1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara	5 Jenis	598,055,731	11 Jenis	619,119,364	5 Jenis	315,267,900	2 Jenis	25,324,100	4 Jenis	95,583,194	0	-	0	-	4 Jenis	120,907,294	15 Jenis	740,026,658	300.00	123.74				
			- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan (Roda Dua)			12 Unit	174,757,204	0		-	0		-	0	-	0	-			12 Unit	174,757,204	#DIV/0!	#DIV/0!	Indikator 2021			
			- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan (Roda Empat)			5 Unit		0		-	0		-	0	-	0	-			5 Unit		- #DIV/0!	#DIV/0!	Indikator 2021			
			- Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional (Roda Dua)			12 Unit		0		-	0		-	0	-	0	-			12 Unit		- #DIV/0!	#DIV/0!	Indikator 2021			
			- Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional (Roda Empat)			5 Unit		0		-	0		-	0	-	0	-			5 Unit		- #DIV/0!	#DIV/0!	Indikator 2021			
			- Jumlah perizinan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	17 Unit	200,000,000	0		17 Unit	169,579,600	17 Unit	25,324,100	17 Unit	32,468,650	0	-	0	-	17 Unit	57,792,750	17 Unit	57,792,750	100.00	28.90				
			1.7.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	4 Jenis	180,000,000	10 Jenis	143,062,660	3 Jenis	142,690,800	1 Jenis		-	5 Jenis	63,114,544	0	-	0	-	5 Jenis	63,114,544	15 Jenis	206,177,204	375.00	114.54		
			1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	1 Jenis	218,055,731	1 Jenis	301,299,500	2 Jenis	2,997,500	0		-	0		-	0	-		1 Jenis	301,299,500	100.00	138.18				
			2. Terwujudnya tata kelola manajemen ASN yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	2. Program Kepegawaiannya	Persentase kinerja layanan kepegawaiannya																				Kabid. Pengadaan, Mutasi dan Pengembangan SDM; Kabid. Pembinaan, Kesejahteraan, Dokumentasi dan Informasi Kepegawaiannya		
			2.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaiannya	Jumlah kegiatan layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN	4 Layanan	1,080,000,000	4 Layanan	859,534,872	4 Layanan	443,240,000	1 Layanan	3,960,000	1 Layanan	12,987,000	0	-	0	-	1 Layanan	16,947,000	5 Layanan	876,481,872	125.00	81.16			
			2.1.1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	- Jumlah dokumen penyusunan kebutuhan pegawai	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	765,945,832	1 Dokumen	18,025,000	0		-	0		-	0	-	0		1 Dokumen	765,945,832	100.00	1531.89			
			- Jumlah peserta seleksi penerimaan Calon ASN			2424 Orang																					
			- Jumlah SK CASN yang terbit			0																					

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp			K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6+12	14=13/5x100%	15	16											
		2.1.2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah peserta seleksi penerimaan CASN	2000 Peserta	741,390,000	0	-	2000 Peserta	272,250,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00			
			Jumlah usulan berkas pemberhentian pegawai	94 Berkas	73,675,000	53 Berkas	55,334,040	61 Berkas	54,450,000	12 Berkas	3,960,000	11 Berkas	12,987,000	0	-	0	-	23 Berkas	16,947,000	76 Berkas	72,281,040	80.85	98.11			
			Jumlah peserta dalam perayaan HUT Korpi	800 Orang	71,025,000	40 Orang	9,040,000	500 Orang	21,025,000	0	-	0	-	0	-	0	-	40 Orang	9,040,000	5.00	12.73					
			Jumlah data Pengembangan aplikasi kepegawaian			11269 Data	29,215,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	11269 Data	29,215,000	#DIV/0!	#DIV/0!					
						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Jumlah data Pengembangan aplikasi kepegawaian				0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
		2.1.6. Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data	2800 Data	143,910,000	0	-	2800 Data	77,490,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	0.00			
			Pengembangan aplikasi kepegawaian			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
		2.2. Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah layanan promosi dan mutasi ASN	3 Layanan	1,115,000,000	3 Layanan	1,207,157,175	3 Layanan	789,129,500	2 Layanan	65,567,575	1 Layanan	50,732,775	0	-	0	-	3 Layanan	116,300,350	6 Layanan	1,323,457,525	200.00	118.70			
			Jumlah berkas usulan mutasi	20 Berkas	25,000,000	40 Berkas	10,400,000	10 Berkas	10,400,000	4 Berkas	-	6 Berkas	-	0	-	0	-	10 Berkas	-	50 Berkas	10,400,000	250.00	41.60			
			Jumlah usulan berkas kenaikan pangkat ASN	450 Berkas		240,000,000	614 Berkas	221,759,941	467 Berkas	198,404,500	479 Berkas	42,337,400	0	21,171,050	0	-	0	-	479 Berkas	63,508,450	1093 Berkas	285,268,391	242.89	118.86		
			- Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Penyesuaian Jazah				48 Orang	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	48 Orang	-	48 Orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
			- Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Dinas	100 Orang			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	#DIV/0!		
			- Jumlah pegawai yang mengikuti seleksi JPT	5 Orang		850,000,000	38 Orang	974,997,234	10 Orang	580,325,000	0 Orang	23,230,175	0 Orang	29,561,725	0	-	0	-	0 Orang	52,791,900	38 Orang	1,027,789,134	760.00	120.92		
		2.2.3. Pengelolaan Promosi ASN	- Jumlah peserta yang mengikuti penilaian kompetensi	20 Orang			37 Orang	-	20 Orang	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	37 Orang	-	185.00	#DIV/0!		
			- Jumlah kajian				0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV						Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I	II	III	IV	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6+12	14=13/5x100%	15	16										
23.	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	12 Orang	1,868,390,000	3 Orang	263,048,300	10 Orang	909,150,000	191 Orang	5,400,000	3 Orang	60,000,000	0	-	0	-	194 Orang	65,400,000	197 Orang	328,448,300	1641.67	17.58			
		Jumlah PNS yang mengikuti program pendidikan lanjutan	12 Orang	1,688,390,000	3 Orang	263,048,300	5 Orang	817,200,000	0	-	3 Orang	60,000,000	0	-	0	-	3 Orang	60,000,000	6 Orang	323,048,300	50.00	19.13			
		Jumlah jabfung dibina	3 Jabatan	180,000,000	0	-	5 Orang	91,950,000	191 Orang	5,400,000	0	-	0	-	0	-	191 Orang	5,400,000	191 Orang	5,400,000	6366.67	3.00			
		Percentase ASN berkinerja minimal bernilai baik	99%	936,610,000	32.84%	391,925,950	100%	244,715,000	16.79%	-	0	61,500,000	0	-	0	-	16.79%	61,500,000	49.63%	453,425,950	50.13	48.41			
	24. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pegawai yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	3050 Orang	936,610,000	912 Orang	391,925,950	2853 Orang	244,715,000	479 Orang	-	0	61,500,000	0	-	0	-	479 Orang	61,500,000	1391 Orang	453,425,950	45.61	48.41			
		Jumlah berkas Penilaian Kerja Pegawai yang di evaluasi dan terinput ke dalam aplikasi	3050 Berkas	300,000,000	0	-	2853 Berkas	38,410,000	479 Berkas	-	0	-	0	-	0	-	479 Berkas	-	479	-	15.70	0.00			
		- Jumlah dokumen evaluasi	4 Dokumen	280,000,000	0	-	4 Dokumen	177,867,500	1 Dokumen	-	1 Dokumen	61,500,000	0	-	0	-	2 Dokumen	61,500,000	2 Dokumen	61,500,000	50.00	21.96			
		- Jumlah aplikasi	1 Aplikasi	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0.00	#DIV/0!		
		Jumlah berkas Penilaian Kerja Pegawai yang di evaluasi dan terinput ke dalam aplikasi			912 ASN	385,925,950	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	912 ASN	385,925,950	#DIV/0!	#DIV/0!			
		- Jumlah dokumen evaluasi dan pembahasan kesejahteraan pegawai			1 Dokumen		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	-	-	-			
	24.3. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	- Jumlah kegiatan			2 Kali		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2 Kali	-	-	-			
		- Jumlah peserta yang mengikuti bimtek penilaian kinerja			82 Orang		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	82 Orang	-	-	-			
		- Jumlah PNS yang menerima penghargaan SLKS	240 PNS	228,610,000	387 PNS	-	200 PNS	6,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	387 PNS	-	161.25	0.00			
		- Jumlah kasus			29 Kasus	6,000,000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	29 Kasus	6,000,000	1450.00	#DIV/0!		Indikator 2021	
		- Jumlah kegiatan	2 Kali	119,000,000			2 Kali	10,375,000	0	-	1 Kali	-							1 Kali	-	-	-			
	24.6.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus	5 Kasus	9,000,000	0	-	15 Kasus	12,062,500	6 Kasus	-	7 Kasus	-	0	-	0	-	13 Kasus	-	13 Kasus	-	260.00	0.00		

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6+12	14=13/5x100%	15	16										
		3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi minimal 20 JP per tahun	40%	3,373,991,804	94.62%	1,610,609,969	40%	4,177,857,000	76.73%	8,221,200	47.52%	449,639,303	0	-	0	-	124.26%	457,860,503	218.87%	2,068,470,472	547.18	61.31	Kabid. Pengadaan, Mutasi dan Pengembangan SDM	
		3.1. Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	80 Orang	782,618,112	91 Orang	587,405,682	40 Orang	1,226,531,000	143 Orang	8,221,200	31 Orang	144,045,703	0	-	0	-	174 Orang	152,266,903	265 Orang	739,672,585	331.25	94.51		
		3.1.1. Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum,	- Jumlah aplikasi			1 Paket		185,100,000	0		0		0	-	0	-	0		1 Paket	185,100,000	#DIV/0!	#DIV/0!			
		3.1.2. Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah koordinasi			1 Kali		4,312,682	0		0		0	-	0	-	0		1 Kali	4,312,682	#DIV/0!	#DIV/0!		2021	
		3.1.3. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta pelatihan	80 Orang	782,618,112	91 Orang	397,993,000	40 Orang	1,226,531,000	143	8,221,200	31 Orang	144,045,703	0	-	0	-	174 Orang	152,266,903	265 Orang	550,259,903	331.25	70.31		
		3.2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah pegawai yang mengikuti Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	50 Orang	2,591,373,692	32 Orang	1,023,204,287	162 Orang	2,951,326,000	12 Orang		65 Orang	305,593,600	0	-	0	-	77 Orang	305,593,600	109 Orang	1,328,797,887	218.00	51.28		
		3.2.1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta pelatihan	50 Orang	2,591,373,692	32 Orang	1,023,204,287	0		0		0		0	-	0	-	0		32 Orang	1,023,204,287	64.00	39.49		Sub Kegiatan 2021

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan I, II, III & IV								Realisasi capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021-2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13 = 6+12	14=13/5x100%	15	16											
		3.2.1. Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta pelatihan			0	-	162 Orang	2,951,326,000	12 Orang	-	65 Orang	305,593,600	0	-	0	-	77 Orang	305,593,600	77 Orang	305,593,600	#DIV/0!	#DIV/0!			
				20,042,283,135	14,942,283,250	15,745,997,485	1,864,924,937	3,477,514,458										5,342,439,395								

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Bontang Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, secara umum capaian realisasi kinerja maupun keuangan telah sesuai target. Dari tabel diatas terdapat beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah telah dilaksanakan secara fisik tetapi pencairan belum dilakukan.
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan masuk dalam daftar rasionalisasi anggaran sehingga belum dilaksanakan pada Semester I.
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya merupakan anggaran *standby* yang akan digunakan saat dibutuhkan.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Knator dan Bangunan Lainnya merupakan anggaran *standby* yang akan digunakan saat dibutuhkan.
- e. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN belum terealisasi secara anggaran tetapi dalam pelaksanaannya sudah dilaksanakan dan usulan formasi telah diunggah melalui aplikasi e-formasi.
- f. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK masih menunggu info dari Kemenpan RB dan BKN terkait pelaksanaannya.
- g. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN sebanyak 3 orang ASN, secara pencairan belum dilaksanakan karena sedang dalam tahap penyelesaian Perwali. Adapun pencairan digunakan untuk bantuan beasiswa IPDN sebanyak 6 orang

2.2 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BONTANG

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Pelaksanaan Seleksi ASN di Masa Pandemi Covid 19

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu elemen yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Untuk itu, diperlukan cara khusus dalam pengelolaan SDM di era reformasi birokrasi seperti saat ini, yaitu birokrasi yang modern, inovatif dan berorientasi pada masyarakat. Tahapan pertama dalam pengelolaan SDM adalah dengan memahami yang menjadi tugas dan peran kita sebagai ASN.

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan, bahwa setiap instansi pemerintah wajib Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pegawai negeri sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selanjutnya sesuai amanat Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa analisis jabatan dan analisis beban kerja dilakukan oleh instansi pemerintah mengacu pada pedoman yang ditetapkan Menteri. Mentari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Peraturan Mentari pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan. Analisis beban kerja adalah Teknik manajemen yang dilakukan secara sistemis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

Pelaksanaan analisis beban kerja bertujuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang memadai pada setiap instansi serta mampu melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Menghasilkan tolok ukur bagi pegawai/unit organisasi dalam pembagian tugas serta melaksanakan kegiatannya, yaitu berupa norma waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, standar beban kerja dan prestasi kerja, Menyusun formasi pegawai, serta penyempurnaan sistem prosedur kerja dan manajemen lainnya.

Analisa beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggungjawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang pegawai.

Pada Tahun 2021, untuk memenuhi kebutuhan pegawai, Pemerintah berencana membuka lowongan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini. Pengumuman formasi dan proses pendaftaran direncanakan akan dilaksanakan pada akhir Juni hingga minggu keempat Bulan Juli. Formasi akan dibuka baik untuk instansi pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Pelaksanaan seleksi perlu dimitigasi mengingat meningkatnya jumlah kasus pada saat ini.

Sebagian pakar telah menganjurkan pemerintah untuk segera menghentikan kegiatan secara total. Hal ini dipercaya akan mampu menurunkan tingkat penularan dan mempermudah kontrol. Di sisi lain, Ketika kegiatan ekonomi dihentikan secara total, maka banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Berkaca pada pengalaman tahun 2020, beberapa pemilik usaha telah menutup usahanya, Sebagian telah mengurangi karyawan untuk meminimalkan dampak lesunya bisnis yang dialami.

Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, rencana rekrutmen CPNS dan PPPK menjadi angin segar yang memberi harapan untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan. Proses persiapan telah dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian PAN-RB serta pihak-pihak terkait. Naskah soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dan PPPK non Guru telah diintegrasikan ke dalam sistem CAT BKN.

Menurut Kepala BKN, penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan seleksi ASN 2021 dilakukan lebih ketat, dengan mengantisipasi terjadinya potensi penyebaran kerumunan peserta ujian di lapangan. Ketersediaan titik lokasi yang memadai dan perlunya skenario pelaksanaan ujian bila terjadi kluster penularan baru di lokasi ujian. Prinsip pelaksanaan Seleksi ASN 2021 yang masih berlangsung di tengah pandemic ini harus disesuaikan dengan kondisi genting adanya varian baru Covid-19, meskipun berkonsekuensi terhadap perpanjangan durasi pelaksanaan ujian.

BAB III **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN** **DALAM PERUBAHAN RENJA BKPSDM TAHUN 2022**

3.1 PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BKPSDM TAHUN 2022

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2022 sampai dengan TW II dan adanya perubahan kebutuhan Perangkat Daerah, maka pada Renja Perubahan 2022 ini dilakukan penyesuaian kebutuhan anggaran, beserta indikator dan target sub kegiatan, kegiatan maupun pada program.

Berikut adalah Sub Kegiatan yang mengalami perubahan anggaran sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
17. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
18. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
19. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
20. Pengelolaan Data Kepegawaian

21. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
22. Pengelolaan Promosi ASN
23. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
24. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN
25. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
26. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
27. Pembinaan Disiplin ASN
28. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
29. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
30. Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Berikut adalah tabel perubahan rencana program dan kegiatan BKPSDM Tahun 2022.

TABEL 3.1 PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BKPSDM TAHUN 2022

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	% %
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	10.684.083.593	10.127.639.087	(556.444.506)	-5,21%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan		1 dokumen	17.510.000	11.000.000	(6.510.000)	-37,18%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen		17.510.000		(6.510.000)	-37,18%
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 dokumen		11.000.000		
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan		46 orang	8.672.622.065	8.217.902.488	(454.719.577)	-5,24%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	46 orang		8.672.622.065		(454.719.577)	-5,24%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		46 orang /bulan		8.217.902.488		
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian		56 orang	562.469.000	460.242.500	(102.226.500)	-18,17%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	104 stel		100.000.000		(810.000)	-0,81%
		- Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		199 paket		99.190.000		
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/bimtek yang diikuti sesuai tupoksi	69 kali		314.000.000		10.000.000	3,18%
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		50 orang		324.000.000		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan kegiatan	1 kali		148.469.000		(111.416.500)	-75,04%
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		95 orang		37.052.500		
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum		4 layanan	697.613.298	602.127.415	(95.485.883)	-13,69%
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibutuhkan	10 jenis		146.354.306		(72.265.004)	-49,38%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6 paket		74.089.302		
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah jenis bahan logistik kantor yang dibutuhkan	10 jenis		120.000.000		(86.571.196)	-72,14%
		- Jumlah kotak nasi	1050 kotak					
		- Jumlah kotak snack	2180 kotak					
		- Jumlah porsi makan minum tamu	80 porsi					
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 paket		33.428.804		
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan & penggandaan yang dibutuhkan	10 jenis		107.082.992		33.387.817	31,18%
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		15 paket		140.470.809		
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	69 OH		324.176.000		29.962.500	9,24%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 laporan		354.138.500		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	% ERTAMBAH/ (BERKURANG)
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah		4 jenis	36.850.542	198.963.696	162.113.154	439,92%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	3 jenis		35.719.005		162.123.493	453,89%
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		27 unit		197.842.498		
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	1 jenis		1.131.537		(10.339)	-0,91%
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		11 unit		1.121.198		
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 jenis	332.434.288	322.135.088	(10.299.200)	-3,10%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah materai yang tersedia	600 lembar		8.250.000		-	0,00%
		- Jumlah surat yang dikirim	70 surat					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 laporan		8.250.000		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan layanan komunikasi kantor	12 bulan		108.000.000		(35.500.000)	-32,87%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan		72.500.000		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak Daerah	7 orang		216.184.288		25.200.800	11,66%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 laporan		241.385.088		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	% ERTAMBAH/ (BERKURANG)
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Barang Milik Daerah yang dipelihara		5 jenis	364.584.400	315.267.900	(49.316.500)	-13,53%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan (Roda Dua)	12 unit		221.584.400		(52.004.800)	-23,47%
		- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan (Roda Empat)	5 unit					
		- Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional (Roda Dua)	12 unit					
		- Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional (Roda Empat)	5 unit					
		- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		18 unit		169.579.600		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan gedung kantor	11 jenis		140.000.000		2.690.800	1,92%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		55 unit		142.690.800		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	2 jenis		3.000.000		(2.500)	-0,08%
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 unit		2.997.500		
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Dimensi Kualifikasi, Indeks Dimensi Kinerja, Indeks Dimensi Disiplin	15, 25, 4		3.240.125.000		(853.890.500)	-26,35%
		Persentase kinerja layanan kepegawaian		100%		2.386.234.500		
A	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN		4 layanan	829.935.000	443.240.000	(386.695.000)	-46,59%

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	- Jumlah dokumen penyusunan kebutuhan pegawai	1 dokumen		20.000.000		(1.975.000)	-9,88%
		- Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		1 Dokumen		18.025.000		
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah peserta seleksi penerimaan CASN	2000 peserta		650.000.000		(377.750.000)	-58,12%
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 Dokumen		272.250.000		
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah usulan berkas pemberhentian pegawai	61 berkas		45.000.000		9.450.000	21,00%
		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		1 Dokumen		54.450.000		
4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah peserta dalam perayaan HUT Korpri	500 orang		21.025.000		-	0,00%
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		1 lembaga		21.025.000		
5	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data	2000 data		93.910.000		(16.420.000)	-17,48%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian		1 dokumen		77.490.000		
B	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah layanan promosi dan mutasi ASN		3 layanan	810.400.000	789.129.500	(21.270.500)	-2,62%
1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah berkas usulan mutasi	10 berkas		10.400.000		-	0,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		2 dokumen		10.400.000		
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	- Jumlah usulan berkas kenaikan pangkat	467 berkas		200.000.000		(1.595.500)	-0,80%
		- Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		680 dokumen		198.404.500		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pengelolaan Promosi ASN	- Jumlah pegawai yang mengikuti seleksi JPT	10 orang		600.000.000		(19.675.000)	-3,28%
		- Jumlah peserta yang mengikuti penilaian kompetensi	40 orang					
		- Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		2 dokumen		580.325.000		
C	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi		12 orang	1.155.290.000	909.150.000	(246.140.000)	-21,31%
1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang mengikuti program pendidikan lanjutan	12 orang		1.110.290.000		(293.090.000)	-26,40%
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		3 orang		817.200.000		
2	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah jabfung dibina	5 orang		45.000.000		46.950.000	104,33%
		Jumlah ASN Fungsional yang Dibina		191 orang		91.950.000		
D	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Pegawai yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya		2853 orang	444.500.000	244.715.000	(199.785.000)	-44,95%
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah berkas Penilaian Kerja Pegawai yang di evaluasi dan terinput ke dalam aplikasi	2853 berkas		177.000.000		(138.590.000)	-78,30%
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		680 dokumen		38.410.000		
2	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen evaluasi	4 dokumen		230.000.000		(52.132.500)	-22,67%
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		4 dokumen		177.867.500		
3	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	- Jumlah PNS yang menerima penghargaan SLKS	200 PNS		6.000.000		-	0,00%
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		219 orang		6.000.000		
4	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah kegiatan	2 kali		19.000.000		(8.625.000)	-45,39%
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		10 orang		10.375.000		

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA		PAGU ANGGARAN		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus	15 kasus		12.500.000		(437.500)	-3,50%
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian		1 laporan		12.062.500		
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Dimensi Kompetensi	32%		2.775.791.407		1.642.065.593	59,16%
		Persentase peningkatan kompetensi minimal 20 JP per tahun		20%		4.417.857.000		
A	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis		291 orang	250.000.000	1.226.531.000	976.531.000	390,61%
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta diklat	180 orang		250.000.000		976.531.000	390,61%
		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		531 orang		1.226.531.000		
B	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah pegawai yang mengikuti Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		222 orang	2.525.791.407	3.191.326.000	665.534.593	26,35%
1	Pembinaan, Pengkoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta diklat	125 orang		2.525.791.407		665.534.593	26,35%
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama		3 dokumen		3.191.326.000		
	TOTAL				16.700.000.000	16.931.730.587		

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang selain menjadi acuan dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022 berfungsi pula sebagai pengendali dalam pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang. Dengan adanya RENJA ini diharapkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk menghasilkan pelayanan yang bersifat cepat, akurat dan transparan.

Perubahan target dan pagu anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan yang dinamis. Dalam pelaksanaannya kritik dan saran yang membangun dibutuhkan sebagai bahan penyusunan dan penyempurnaan Rencana Kerja tahun berikutnya.